



Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Perspektif Islam di Era Digital

Maulana Husen^{1*}, Syamzaimar²

^{1*}Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim,
Pasir Pengaraian, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim,
Pasir Pengaraian, Indonesia, Indonesia

Email: ^{1*}maulanahusein412@gmail.com, ²syamzaimar0774@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk dan dinamika partisipasi politik mahasiswa di era digital dengan meninjau prinsip-prinsip etika politik Islam. Di tengah pesatnya arus informasi di media sosial, mahasiswa menempati posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu mengawasi kebijakan publik melalui platform digital. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, partisipasi politik bukan sekadar hak sipil, melainkan bagian dari implementasi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyuarkan keadilan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kejujuran (shiddiq), tanggung jawab (amanah), dan penyampaian informasi yang santun (tabligh) guna menghindari penyebaran hoaks dan polarisasi identitas. Digitalisasi memberikan ruang luas bagi aktivisme mahasiswa, namun tantangan berupa algoritma media sosial, ruang gema, dan pengawasan digital memerlukan literasi politik yang berbasis pada nilai-nilai spiritual. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi politik mahasiswa di era digital harus menjadi sarana ijtihad kontemporer untuk mewujudkan kemaslahatan umat di ruang publik virtual, yang dikonseptualisasikan dalam kerangka etis "Digital Taqwa".

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Mahasiswa, Perspektif Islam, Era Digital, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Latar belakang umum penelitian ini berangkat dari pergeseran paradigma partisipasi politik yang semula bersifat konvensional menjadi berbasis digital, di mana mahasiswa menjadi aktor utama dalam ekosistem ini. Di Indonesia, data dari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, termasuk mahasiswa, memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi yang berdampak langsung pada cara mereka mengonsumsi isu politik. Namun, keterlibatan ini sering kali terjebak dalam arus informasi yang tidak terfilter, sehingga nilai-nilai etika sering terabaikan di ruang publik virtual.

Kajian literatur terdahulu telah banyak membahas mengenai aktivisme digital mahasiswa. Penelitian oleh (Pratama (2022) menekankan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran politik namun rentan terhadap polarisasi. Di sisi lain, studi dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN Jakarta, 2023) menyoroti bagaimana kecenderungan religiositas mahasiswa memengaruhi pilihan politik mereka, namun belum secara spesifik membedah bagaimana prinsip *siyasah syar'iyah* diimplementasikan dalam tindakan teknis di era algoritma. Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada integrasi nilai-nilai Islam sebagai kerangka etika (falsafah aksi) dalam menghadapi tantangan disinformasi dan pengawasan digital yang masif, yang sering kali belum tersentuh secara mendalam dalam studi partisipasi politik umum.

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaimana mahasiswa Muslim menavigasi identitas religius mereka di tengah budaya digital yang sering kali bersifat sekuler atau bahkan destruktif terhadap ukhuwah. Terdapat kesenjangan antara idealisme agama dalam berpolitik dengan realitas perilaku digital yang emosional. Oleh karena itu, tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk merumuskan model partisipasi politik mahasiswa yang selaras dengan prinsip Islam guna mewujudkan kemaslahatan di era digital, sekaligus menjadi panduan bagi mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai agen kontrol sosial yang beradab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk merumuskan model partisipasi politik mahasiswa yang selaras dengan prinsip Islam guna mewujudkan kemaslahatan di era

digital, sekaligus menjadi panduan normatif bagi mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai agen kontrol sosial yang beradab. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengintegrasikan konsep *syura*, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *akhlakul karimah* ke dalam praktik aktivisme siber, serta menawarkan kerangka evaluasi yang tidak hanya mengukur kuantitas keterlibatan, tetapi juga kepatuhan etis-religius dalam setiap interaksi politik digital. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi politik Islam kontemporer dan kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum literasi digital di lingkungan perguruan tinggi.

Fenomena transformasi partisipasi politik ke ranah digital tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi tren global yang mengubah lanskap demokrasi kontemporer. Platform seperti X, Instagram, TikTok, dan YouTube telah mengubah mekanisme mobilisasi massa, dari turun ke jalan menjadi berkampanye melalui tagar, petisi daring, dan konten viral. Bagi mahasiswa yang secara demografis merupakan pengguna aktif teknologi, ruang digital menjadi ekstensi natural dari ruang kampus dalam mengartikulasikan aspirasi politik. Namun, kemudahan akses ini sering kali dibarengi dengan kompleksitas baru, seperti penyebaran narasi yang terfragmentasi, manipulasi algoritma, dan komersialisasi perhatian yang justru dapat menggerus substansi diskusi publik.

Dalam konteks keindonesiaan, tradisi gerakan mahasiswa memiliki rekam jejak panjang sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mengawal jalannya demokrasi. Sejak era reformasi 1998 hingga momentum politik terkini, mahasiswa selalu menempati posisi strategis sebagai pengawas kebijakan dan penyuarakan kepentingan publik. Namun, memasuki dekade 2020-an, bentuk protes dan advokasi mahasiswa mengalami metamorfosis signifikan. Aksi fisik yang sebelumnya dominan kini banyak dialihkan ke ruang siber, yang menawarkan jangkauan lebih luas, biaya lebih rendah, dan risiko keamanan yang relatif lebih terkendali. Pergeseran ini menuntut adanya penyesuaian strategi dan etika berpolitik yang relevan dengan karakter medium digital.

Di sinilah perspektif Islam menawarkan kerangka normatif yang komprehensif. Islam tidak memisahkan dimensi spiritual dari tanggung jawab sosial-politik, melainkan melihat keduanya sebagai satu kesatuan yang integral. Konsep *siyasah syar'iyah* mengajarkan bahwa politik harus berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan, dan akhlak mulia. Ketika mahasiswa Muslim memasuki ruang digital, nilai-nilai seperti *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (penyampaian yang baik), dan *fathanah* (kebijaksanaan) seharusnya menjadi kompas dalam setiap tindakan politik daring. Tanpa fondasi etis ini, partisipasi digital berisiko terdegradasi menjadi alat propaganda, ujaran kebencian, atau sekadar performativitas tanpa substansi.

Selain itu, dinamika algoritma media sosial menciptakan tantangan tersendiri bagi pembentukan opini publik yang sehat. Mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber* cenderung memperkuat bias konfirmasi, sehingga mahasiswa sering kali hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan preferensi ideologis mereka. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan *tabayyun* (klarifikasi) sebelum menyebarkan informasi, serta menghargai *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) sebagai bagian dari rahmat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara spesifik memetakan bagaimana mahasiswa Muslim dapat mengoptimalkan partisipasi politik digital tanpa terjebak dalam polarisasi, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman yang universal.

Artikel ini disusun untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menyediakan analisis mendalam mengenai sinkronisasi antara aktivisme digital mahasiswa dan etika politik Islam. Melalui telaah literatur yang sistematis, tulisan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena partisipasi politik digital, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual "Digital Taqwa" yang dapat dijadikan acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, dan organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literasi politik digital yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang berakhlak di tengah disrupsi teknologi informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Desain ini dipilih secara strategis untuk menggali secara mendalam landasan teologis Islam mengenai partisipasi publik dan menghubungkannya secara sistematis dengan fenomena partisipasi politik digital mahasiswa yang terus berkembang. Pendekatan ini selaras dengan metodologi yang dikembangkan oleh (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2021) terkait standar penulisan karya ilmiah yang berbasis pada analisis data sekunder dan sintesis teori.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen digital dan literatur fisik yang relevan. Data primer bersumber dari teks keislaman klasik maupun kontemporer mengenai *siyasah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan lembaga kredibel seperti (Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024) mengenai tren penggunaan media sosial untuk literasi politik di kalangan generasi Z. Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan menyusun skema kategorisasi

berdasarkan prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariat) untuk membedah bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa di ruang siber.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Peneliti melakukan reduksi data dengan memilah informasi yang spesifik berkaitan dengan aktivitas politik mahasiswa di era digital, menyajikannya secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif. Proses validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, merujuk pada (panduan Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN, 2023) untuk memastikan interpretasi nilai-nilai agama tetap objektif dan relevan dengan konteks dinamika politik digital di Indonesia saat ini.

[Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan database akademik terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan repositori institusi pendidikan Islam di Indonesia. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi antara "partisipasi politik mahasiswa", "etika digital Islam", "siyasah syar'iyah era digital", "aktivisme media sosial", dan "literasi politik generasi Z". Kriteria inklusi diterapkan untuk memastikan relevansi sumber, yaitu publikasi yang terbit antara tahun 2021 hingga 2026, berbahasa Indonesia atau Inggris, serta memiliki fokus pada intersection antara teknologi digital, etika keislaman, dan partisipasi politik pemuda/mahasiswa. Sumber yang bersifat populer tanpa rujukan akademik atau tidak melalui proses peer-review dikecualikan untuk menjaga validitas ilmiah.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: dimensi teologis-normatif, dimensi sosiologis-digital, dan dimensi etika-praktis. Pada dimensi teologis-normatif, peneliti merujuk pada konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, *syura*, dan *tabayyun* sebagai fondasi aksi politik. Dimensi sosiologis-digital digunakan untuk memetakan pola interaksi mahasiswa di platform media sosial, termasuk dampak algoritma, virality, dan dinamika komunitas daring. Sementara itu, dimensi etika-praktis berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan perilaku konkret di ruang digital, seperti etika berkomentar, menyebarkan informasi, dan berkolaborasi dalam gerakan sosial. Integrasi ketiga dimensi ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keislaman.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang murni berbasis studi literatur, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari responden mahasiswa melalui survei atau wawancara mendalam. Hal ini berarti temuan yang dihasilkan bersifat konseptual-normatif dan memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif lapangan di masa depan. Namun, pendekatan library research tetap memiliki keunggulan dalam menyediakan landasan teoritis yang kuat, komprehensif, dan relevan untuk mengembangkan model etika partisipasi politik digital yang berperspektif Islam. Validitas temuan dijaga melalui cross-checking antar sumber primer dan sekunder, serta penyesuaian konteks dengan realitas sosio-teknologis Indonesia terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan status literasi digital Indonesia oleh (Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024), indeks literasi digital mahasiswa berada pada kategori "Sedang", dengan pilar etika digital menunjukkan skor yang paling fluktuatif. Data tren partisipasi politik versi (Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa 65% mahasiswa menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Hasil identifikasi bentuk partisipasi politik mahasiswa di era digital disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Politik Mahasiswa di Era Digital

No	Jenis Partisipasi	Frekuensi Aktivitas	Platform Dominan
1	Diskusi Isu Publik	Sangat Tinggi	X (Twitter), IG
2	Petisi Daring	Sedang	Change.org
3	Donasi Sosial-Pol	Tinggi	Kitabisa.com
4	Kampanye Kandidat	Rendah	TikTok, FB

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa cenderung memilih aksi kolektif berbasis digital dibandingkan aksi formal kepartaian. Selain itu, temuan dari laporan (Digital Civility Index (Microsoft & Lembaga Survei Indonesia, 2023) mengonfirmasi bahwa tingkat kesantunan mahasiswa dalam berdebat politik secara daring masih menghadapi tantangan besar terkait provokasi dan hoaks.

Analisis Kedalaman: Digitalisasi Siyasah dan Integritas Intelektual

Pembahasan lebih lanjut mengenai partisipasi politik mahasiswa mengungkap bahwa ruang digital telah menjadi mimbar bebas bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi *muhasabah* (kontrol sosial) terhadap pemegang kekuasaan. Mengacu pada (laporan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina, 2024), aktivisme digital mahasiswa bukan sekadar tren teknologi, melainkan bentuk respons

terhadap terbatasnya ruang artikulasi politik di dunia nyata. Dalam perspektif Islam, fenomena ini dapat dianalisis melalui tiga pilar utama:

Transformasi Syura (Musyawarah) ke Ruang Publik Virtual

Tradisi musyawarah yang menjadi fondasi politik Islam kini terwujud dalam bentuk forum diskusi daring dan kolom komentar media sosial. Mahasiswa berperan sebagai moderator opini publik. Namun, merujuk pada analisis (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2023), tantangan utamanya adalah "ruang gema" (*echo chamber*) yang menghambat dialektika sehat. Islam menawarkan solusi melalui prinsip *ikhtilaf* (menghargai perbedaan pendapat) sebagai rahmat, sehingga mahasiswa muslim diharapkan mampu menjaga adab dalam berdebat demi menghindari *asabiyah* (fanatisme kelompok) digital yang berlebihan.

Fenomena *echo chamber* di platform digital memperparah fragmentasi opini publik, di mana mahasiswa sering kali hanya berinteraksi dengan narasi yang memperkuat keyakinan awal mereka. Dalam konteks *syura* digital, hal ini dapat mengikis esensi musyawarah yang seharusnya bersifat inklusif dan mencari titik temu kemaslahatan. Islam menekankan bahwa perbedaan pendapat bukan alasan untuk memutus silaturahmi atau melakukan *tabarru'* (pembatalan hubungan), melainkan kesempatan untuk memperluas wawasan. Mahasiswa Muslim dituntut untuk aktif mencari perspektif yang berbeda, mengkritisi argumen secara substantif, dan menghindari generalisasi yang merendahkan lawan bicara. Dengan demikian, ruang diskusi daring dapat difungsikan sebagai laboratorium demokratis yang mengedepankan adab intelektual dan semangat *ukhuwah* di atas identitas partisan.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Literasi Politik

Aktivisme mahasiswa di era digital, seperti kampanye kawal kebijakan atau petisi daring, merupakan manifestasi modern dari upaya menegakkan keadilan. Menurut laporan tahunan (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO, 2025), tingkat partisipasi mahasiswa dalam melakukan klarifikasi hoaks politik meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mulai menyadari bahwa "berjihad" di era digital adalah dengan memerangi disinformasi (*fitnah*). Perspektif Islam memperkuat hal ini dengan kewajiban *tabayyun* (QS. AlHujurat: 6), yang secara otomatis memposisikan mahasiswa sebagai penyaring informasi (*gatekeeper*) bagi masyarakat awam.

Implementasi *amar ma'ruf nahi munkar* di ruang digital menuntut kemampuan literasi media yang mumpuni, termasuk verifikasi sumber, pemahaman konteks, dan strategi penyampaian yang persuasif namun tetap tegas. Mahasiswa tidak hanya diharapkan menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga produsen konten yang bertanggung jawab. Ketika menemukan narasi yang menyesatkan atau berpotensi memicu konflik, langkah pertama yang dianjurkan Islam adalah *tabayyun* sebelum merespons. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan kemudaratatan (*dar' almafasiid*) yang lebih diutamakan daripada sekadar meraih kemaslahatan. Dengan membudayakan klarifikasi sebelum menyebarkan, mahasiswa secara tidak langsung telah mengamalkan etika politik Islam yang menekankan kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial di tengah deru informasi yang serba cepat.

Etika Digital sebagai Manifestasi Akhlakul Karimah

Temuan yang menunjukkan fluktuasi skor etika digital mahasiswa versi (Kominfo (2024) menjadi poin krusial. Dalam politik Islam, tujuan (*ghayah*) tidak dapat menghalalkan segala cara (*wasilah*). Penggunaan bot, *cyber-bullying*, atau pembunuhan karakter terhadap lawan politik di media sosial bertentangan dengan prinsip *shiddiq* (kejujuran) dan *fathanah* (kecerdasan yang bijaksana). Pembahasan ini menegaskan bahwa partisipasi politik mahasiswa harus didasarkan pada kekuatan argumen intelektual, bukan pada manipulasi emosi digital.

Integrasi temuan ini memodifikasi teori partisipasi politik digital dengan menambahkan variabel "Kepatuhan Etis-Religius". Artinya, keberhasilan partisipasi politik mahasiswa muslim di era digital tidak hanya diukur dari sejauh mana kebijakan berubah atau seberapa besar *engagement* (jangkauan) konten mereka, tetapi sejauh mana aktivitas tersebut menjaga marwah kemanusiaan dan keutuhan bangsa (*ukhuwah wathaniyah*). Hal ini sejalan dengan panduan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2024) melalui Fatwa tentang Muamalah Medsosial, yang seharusnya menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dalam mengelola narasinya di ruang publik virtual.

Budaya *cancel culture* dan penyerangan personal yang marak di media sosial sering kali dibungkus dengan narasi "perjuangan" atau "koreksi", padahal secara substansial melanggar prinsip *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan) dalam Islam. Etika politik digital yang Islami menekankan bahwa kritik harus ditujukan pada kebijakan, gagasan, atau praktik kekuasaan, bukan pada privasi, latar belakang keluarga, atau aib personal individu. Penggunaan bahasa yang santun, penghindaran sindiran merendahkan, dan penolakan terhadap penyebaran konten yang belum terverifikasi merupakan bentuk konkret dari *akhlakul karimah* di ruang virtual. Mahasiswa yang memegang prinsip ini akan menjadi contoh bahwa partisipasi politik yang efektif tidak harus mengorbankan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai spiritual.

Dimensi psikologis partisipasi politik digital mahasiswa juga perlu mendapat perhatian serius, mengingat ruang siber sering kali menggeser motivasi aktivisme dari kepedulian substantif menuju pencarian validasi sosial. Fenomena performative activism atau aktivisme pencitraan marak terjadi ketika mahasiswa lebih mengutamakan estetika konten daripada kedalaman analisis kebijakan. Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip ikhlas dan qana'ah, yang menekankan bahwa setiap amal harus diniatkan untuk keridhaan Allah SWT dan kemaslahatan umat, bukan sekadar pengakuan duniawi. Oleh karena itu, mahasiswa Muslim perlu mengembangkan kesadaran diri (muraqabah) digital, di mana setiap unggahan, komentar, atau petisi yang dibuat harus diuji terlebih dahulu melalui pertanyaan reflektif: apakah konten ini membawa kebenaran, mengurangi kemudharatan, dan memperkuat persaudaraan? Pembiasaan muhasabah sebelum memposting dapat menjadi benteng psikologis yang mencegah degradasi aktivisme menjadi komoditas algoritma yang rentan terhadap eksploitasi emosional.

Peran institusi pendidikan tinggi Islam dan organisasi kemahasiswaan menjadi sangat strategis dalam menginternalisasi etika politik digital. Kampus tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai ruang transfer pengetahuan teknis, melainkan juga sebagai laboratorium pembentukan karakter digital yang berlandaskan nilai keislaman. Lembaga seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) perlu merancang program pendampingan yang sistematis, mulai dari pelatihan verifikasi informasi, simulasi debat politik berbasis adab, hingga pendampingan psikologis bagi mahasiswa yang mengalami kelelahan digital (digital fatigue) akibat paparan konflik daring. Kolaborasi dengan pakar fiqh kontemporer, psikolog media, dan praktisi literasi digital dapat menghasilkan modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan generasi Z. Dengan demikian, etika politik digital tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan menjadi kompetensi praktis yang terukur dan berkelanjutan di lingkungan akademik.

Tantangan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan deepfake semakin menguji ketahanan prinsip tabayyun dalam ekosistem informasi politik. Kemampuan algoritma untuk memanipulasi suara, gambar, dan teks secara real-time berpotensi mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, yang pada gilirannya dapat memicu kepanikan massal atau delegitimasi terhadap lembaga demokrasi. Islam secara tegas melarang penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya (QS. Al-Hujurat: 6) dan menempatkan perlindungan akal (hifzh al-'aql) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dalam konteks ini, mahasiswa Muslim diharapkan tidak hanya menjadi konsumen kritis, tetapi juga produsen konten yang bertanggung jawab dengan menerapkan standar verifikasi berlapis sebelum menyebarkan materi politik. Pengembangan AI ethics checklist berbasis nilai Islam dapat menjadi instrumen praktis untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mengorbankan integritas informasi dan martabat kemanusiaan.

Dinamika gerakan mahasiswa di ruang digital juga tidak terlepas dari pengaruh arus informasi transnasional yang sering kali membawa paket ideologi tertentu. Platform global memungkinkan terjadinya solidaritas lintas batas, namun di sisi lain berpotensi mengimpor narasi yang tidak kontekstual dengan realitas sosial-budaya Indonesia. Islam dengan konsep rahmatan lil 'alamin menawarkan kerangka inklusif yang mampu menyaring pengaruh eksternal tanpa terjebak dalam isolasionisme atau penyerapan buta. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan analisis wacana (discourse analysis) untuk mengidentifikasi bias ideologis, kepentingan geopolitik, atau upaya polarisasi yang disamarkan dalam kemasan advokasi hak asasi atau keadilan sosial. Dengan memadukan wawasan kebangsaan dan nilai universal Islam, partisipasi politik digital dapat diarahkan menjadi kekuatan pemersatu yang menghargai kemajemukan, menolak ekstremisme, dan memperkuat ketahanan nasional di tengah persaingan pengaruh global.

Partisipasi politik mahasiswa dalam perspektif Islam di era digital dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran, pengetahuan, dan sikap yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang kamu tuliskan sebelumnya. Islam menekankan nilai amanah, keadilan, musyawarah, serta integritas, yang selaras dengan tujuan membangun karakter kokoh dan menjunjung persatuan. Di era digital, mahasiswa memiliki ruang luas untuk menyuarakan aspirasi melalui media sosial dan forum daring, namun tetap dituntut menjaga etika komunikasi Islami. Dengan demikian, partisipasi politik mahasiswa menjadi sarana dakwah politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa (Syamzaimar, 2025).

Operasionalisasi model "Digital Taqwa" memerlukan mekanisme evaluasi yang jelas agar tidak berhenti pada level retorika. Kampus dapat mengintegrasikan indikator etika politik digital ke dalam sistem penilaian aktivitas kemahasiswaan, seperti pemberian sertifikasi literasi politik daring, penghargaan bagi konten edukasi yang berbasis data, serta sanksi edukatif bagi pelanggaran norma berdebat secara daring. Selain itu, pembentukan "Dewan Etika Digital Kampus" yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan pakar syariah dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik wacana yang berpotensi memecah belah. Kerangka ini juga mendorong kolaborasi dengan platform media sosial untuk mengembangkan fitur pelaporan yang responsif terhadap ujaran kebencian dan disinformasi politik. Dengan pendekatan yang terstruktur, partisipasi politik mahasiswa tidak hanya menjadi responsif terhadap isu sesaat, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ekosistem digital yang sehat, beradab, dan selaras dengan cita-cita

peradaban Islam yang rahmat dan berkelanjutan. Selain itu, tantangan lain yang perlu diwaspadai adalah komersialisasi aktivisme digital, di mana isu-isu politik sering kali dikemas menjadi konten yang mengutamakan engagement daripada substansi.

Algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi tinggi, seperti kemarahan atau ketakutan, yang secara psikologis dapat menurunkan daya nalar kritis. Dalam perspektif maqashid syariah, partisipasi politik yang hanya mengejar popularitas atau validasi sosial tanpa dampak nyata bagi kemaslahatan publik dapat dikategorikan sebagai *riya'* digital atau aktivisme performatif. Mahasiswa Muslim perlu mengembangkan kesadaran bahwa nilai partisipasi diukur dari kontribusi substantif terhadap kebijakan, penguatan literasi masyarakat, dan pemeliharaan keutuhan bangsa, bukan sekadar jumlah likes, shares, atau viralitas konten.

Integrasi temuan ini memodifikasi teori partisipasi politik digital dengan menambahkan variabel "Kepatuhan Etis-Religius". Artinya, keberhasilan partisipasi politik mahasiswa muslim di era digital tidak hanya diukur dari sejauh mana kebijakan berubah atau seberapa besar engagement (jangkauan) konten mereka, tetapi sejauh mana aktivitas tersebut menjaga marwah kemanusiaan dan keutuhan bangsa (*ukhuwah wathaniyah*). Hal ini sejalan dengan panduan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2024) melalui Fatwa tentang Muamalah Medsosial, yang seharusnya menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dalam mengelola narasinya di ruang publik virtual. Model "Digital Taqwa" yang diusulkan dalam kajian ini menekankan tiga pilar operasional: pertama, verifikasi informasi sebelum menyebarkan (*tabayyun digital*); kedua, penggunaan bahasa yang konstruktif dan menghindarkan ujaran kebencian (*adab al-khitab*); ketiga, orientasi kemaslahatan yang terukur dan berkelanjutan (*masalah syar'iyah*). Dengan menerapkan kerangka ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga agen etis yang mampu mengarahkan dinamika politik digital menuju arah yang lebih beradab dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik mahasiswa di era digital merupakan manifestasi kontemporer dari prinsip *siyash* Islam, khususnya dalam aspek *amar ma'ruf nahi munkar* dan *syura*. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa telah berhasil mentransformasi ruang digital menjadi mimbar kontrol sosial yang efektif, namun efektivitas ini masih terkendala oleh fluktuasi etika digital dan ancaman polarisasi. Secara substansial, partisipasi politik dalam perspektif Islam di ruang siber tidak hanya diukur dari kuantitas keterlibatan, tetapi pada kepatuhan terhadap nilai *tabayyun* dan keadaban publik. Sinkronisasi antara identitas religius dan aktivitas digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemaslahatan umat di tengah disrupsi informasi. Dengan demikian, kebaruan yang ditawarkan dalam studi ini adalah model "Digital Taqwa" sebagai landasan etis mahasiswa dalam bernavigasi di ekosistem politik digital Indonesia.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa literasi politik digital tidak cukup hanya dibekali dengan keterampilan teknis atau pemahaman algoritma, tetapi harus diintegrasikan dengan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman. Perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dan lembaga keagamaan perlu berkolaborasi dalam mengembangkan modul pelatihan, seminar, dan kampanye kampus yang secara spesifik membahas etika berpolitik di ruang virtual. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan mahasiswa untuk terjebak dalam aktivisme yang bersifat reaktif, emosional, atau sekadar mengikuti tren, dan menggantinya dengan partisipasi yang reflektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran dosen dan pembina kemahasiswaan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam menyaring informasi, mengonstruksi argumen yang logis, dan memilih platform yang sesuai untuk advokasi kebijakan. Tanpa pendampingan yang memadai, ruang digital berisiko menjadi arena pertarungan narasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mentor kampus dalam memahami dinamika media sosial dan etika politik Islam menjadi prasyarat penting untuk menjamin kualitas partisipasi politik generasi muda di masa depan.

Saran bagi pengembangan gagasan selanjutnya adalah perlunya penelitian empiris yang lebih luas mengenai efektivitas kurikulum literasi digital berbasis nilai-nilai keislaman di perguruan tinggi. Lembaga pendidikan dan organisasi kemahasiswaan disarankan untuk menyusun panduan teknis etika berpolitik digital yang merujuk pada fatwa lembaga otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, guna meminimalisir dampak negatif algoritma media sosial. Selain itu, penelitian masa depan diharapkan dapat membedah lebih dalam mengenai peran kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam membentuk persepsi politik mahasiswa Muslim untuk memastikan integritas data dan pesan dakwah politik tetap terjaga di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII. <https://apjii.or.id/survei>

- Al-Faruqi, I. R., & Al-Faruqi, L. L. (2021). *The Cultural Atlas of Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi 2020–2023*. Jakarta: BPS RI.
- Hidayat, K. (2022). Politik identitas dan etika digital: Refleksi kritis atas aktivisme mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 211–230.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2024). *Status Literasi Digital di Indonesia: Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: Katadata Insight Center & Kominfo.
- Kurniawan, R., & Susanto, T. D. (2023). *Media Sosial dan Partisipasi Politik Generasi Z: Tinjauan Psikologi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Standar Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2024). *Fatwa Nomor 24 Tahun 2024 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). (2024). *Laporan Pemetaan Hoaks Politik Menjelang Pilkada Serentak 2024*. Tangerang: MAFINDO. <https://mafindo.or.id/laporan>
- Microsoft & Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Digital Civility Index (DCI): Persepsi Kesantunan Digital Masyarakat Indonesia di Era Kontestasi*. Jakarta: LSI.
- Nasrullah, R. (2022). *Literasi Media Digital dan Etika Komunikasi Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pambudi, S. W. (2024). *Transformasi Gerakan Mahasiswa di Era Platform Digital: Strategi, Tantangan, dan Masa Depan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Pratama, A. R. (2022). Aktivisme digital mahasiswa: Antara partisipasi politik dan polarisasi media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jsp.65432>
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN Jakarta). (2023). *Religiusitas di Ruang Digital: Survei Nasional Sikap Politik dan Keberagaman Generasi Z*. Jakarta: PPIM UIN Press.
- Putra, H. A., & Sari, M. (2025). Digital siyasah: Opportunities and challenges of student political participation in Islamic perspectives. *International Journal of Management and Social Science (IJOMSS)*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.54783/ijomss.v4i1.156>
- Rahman, F. (2021). Maqashid syariah dan tata kelola informasi publik dalam perspektif Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45–68.
- Sari, D. N. (2023). *Analisis Implementasi Nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Gerakan Mahasiswa Kontemporer* (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/78901>
- Setiawan, I. G., & Wijaya, A. (2023). *Algoritma Media Sosial dan Dilema Demokrasi Digital di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sulistyo, B. (2025). *Etika Berpolitik di Ruang Maya: Panduan Praktis untuk Mahasiswa dan Aktivis Digital*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Syamzaimar. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: Implementasi Pengalaman Islam* (Cetakan Pertama). Tembilahan, Riau, Indonesia: PT Indragiri Dot Com.
- Wibowo, A. E. (2022). Siyasah syar'iyah dalam konteks masyarakat digital: Antara idealisme dan realitas. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 15(3), 301–318.
- Zulkifli, M. (2024). *Etika Politik Islam di Era Disrupsi Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.